



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemprov Terima WTP Ke-6 Kalinya

**PEM PROV TERIMA
WTP KE-6 KALINYA**

BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini dinyatakan Perwakilan BPK, Selamat Kurniawan, pada Rapat Paripurna Pengumuman DPRD Provinsi Bengkulu pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin (12/5).

☞ Baca **PEM PROV...**Hal 9



PARIPURNA: DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian LHP oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu atas LKPD Pemprov TA 2022, kemarin.

Usai paripurna, Gubernur Bengkulu Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA mengakui, meskipun Pemprov mendapatkan WTP ke-6 kalinya, namun masih ada temuan-temuan dari tim pemeriksa BPK. Kendati demikian, Gubernur memastikan setiap OPD akan diminta segera menyelesaikan temuan tersebut. "Alhamdulillah Pemprov Bengkulu kembali mendapatkan WTP

ke-6 kali. Tapi memang masih banyak temuan, catatan-catatan. Maka untuk mendapatkannya itu ditindaklanjuti dari OPD-OPD-nya," sampai Rohidin.

Ditambahkannya, untuk temuan dari pihak BPK tersebut, ada temuan yang bersifat kualitatif terhadap pengelolaan keuangan juga ada beberapa temuan terkait tentang kerugian negara. "Saya katakan ini harus segera dilakukan dan segera didata, agar semua OPD yang ada temuan

segera menyelesaikan," imbuhnya.

Selain itu juga ada temuan terkait bagaimana Pantai Panjang bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Provinsi Bengkulu. Maka Pemprov segera membuat regulasi untuk retribusi Pantai Panjang.

"Pantai Panjang memang belum ada retribusi dan memang selama ini kita juga belum ada dasar. Ternyata dicek di kota pun ternyata dulu belum ada ditarik retribusinya. Kalau

sudah ada di kota dulu, bisa kita jadikan rujukan. Jadi kita sedang menyusun regulasinya," ujarnya.

Rohidin mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun regulasi retribusi standar sewa lahan dan bangunan. "Kita akan susun regulasi untuk standar sewa lahan itu seperti apa, retribusi kalau bangunan seperti apa. Ketika belum ada standar itu juga belum bisa kita tarik retribusi juga jadi temuan juga," tutupnya. (bil)